

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara. Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam membangun perekonomian, pemerintah menempuh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan luar negeri. Pelaksanaan suatu kebijakan melewati suatu proses yang di dalamnya berperan institusi atau lembaga seperti lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan keuangan, misalnya lembaga keuangan bank berperan sebagai lembaga penyedia dana melalui mobilisasi dana masyarakat.

Dilihat dari segi jenisnya, lembaga keuangan bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Seperti yang dijelaskan oleh Sudirman (2013:13) bahwa:

Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Keberadaan BPR sangat membantu usaha mikro, kecil dan menengah karena kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil. Di kota Bandung, perkembangan BPR dinilai cukup baik dilihat dari banyaknya BPR konvensional yang beroperasi di kota Bandung, namun perkembangan BPR menghadapi kendala akibat persaingan dengan bank umum yang juga membidik usaha mikro, kecil dan menengah sebagai sasaran penyaluran kredit. Untuk dapat memaksimalkan peran BPR dan menghadapi persaingan di antara lembaga keuangan lainnya, maka kinerja BPR perlu ditingkatkan.

Kinerja merupakan salah satu faktor penting yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Kinerja bank mencerminkan kemampuan operasional bank baik dalam bidang penghimpunan dana, penyaluran dana, teknologi serta sumber daya manusia. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh lembaga perbankan, berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP/2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004. Pelaksanaan penilaian tersebut dikenal dengan istilah CAMELS, yang terdiri dari *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

Ketentuan pada aspek *capital* menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi. Penilaian *asset quality* adalah penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP). KAP sendiri adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya (Dendawijaya, 2009:61). Penilaian KAP menggunakan *Bad Debt Ratio* (BDR).

Aspek *management* pada penilaian kinerja bank dapat diproksikan dengan rasio *Net Profit Margin* (NPM), hal ini berdasarkan pada seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen risiko dan kepatuhan bank yang mempengaruhi perolehan laba. Penilaian faktor *earning* melalui penilaian rasio *Return on Assets* (ROA) yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki.

Pada aspek *liquidity*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya. Penilaian rasio sensitivitas terhadap risiko pasar

didasarkan pada *Interest Expense Ratio* (IER). IER merupakan ukuran atas biaya dana yang dikumpulkan oleh bank yang dapat menunjukkan efisiensi bank dalam mengumpulkan sumber-sumber dananya.

Bank sebagai lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana dan kepercayaan masyarakat. Pada kegiatan usaha bank tersebut akan menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. BPR sebagai bagian dari sistem perbankan Indonesia harus mempunyai kinerja yang baik dan dapat dipercaya masyarakat sehingga dapat berkontribusi maksimal dalam menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

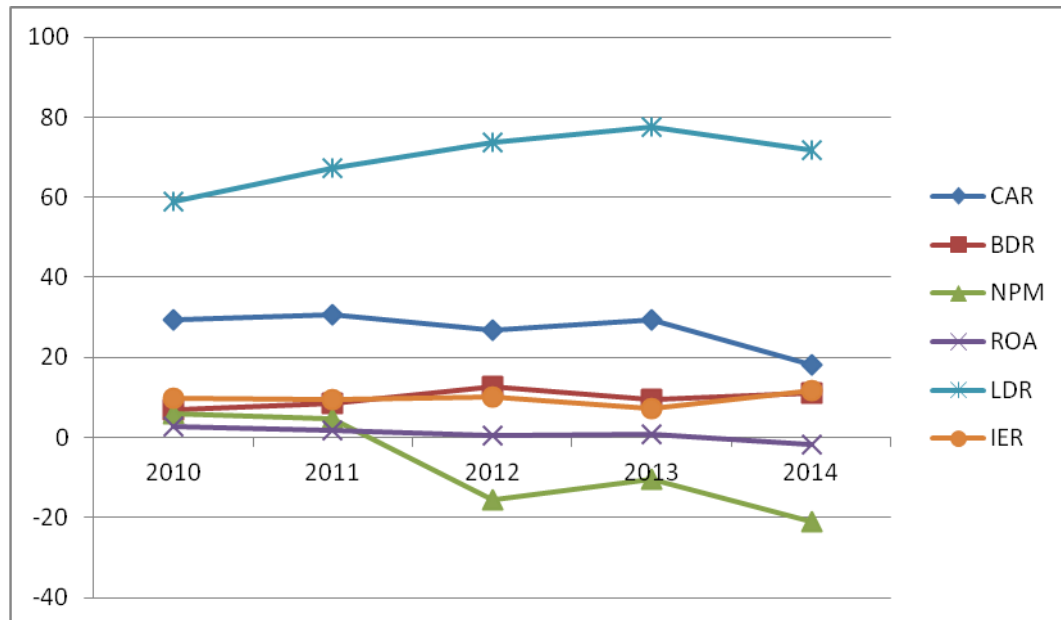
Sebagai lembaga di bawah pengawasan Bank Indonesia, BPR diharuskan menjaga kinerja keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan oleh pihak BPR kepada Bank Indonesia dapat dijadikan dasar untuk melakukan analisis baik buruknya kinerja BPR. Namun pada kenyataannya, kinerja BPR mengalami perbedaan dengan yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Berikut adalah perkembangan rata-rata kinerja BPR di kota Bandung dengan metode CAMELS dari tahun 2010-2014.

Tabel 1.1
Rata-rata Kinerja BPR di Kota Bandung dengan Metode CAMELS
Periode Tahun 2010-2014

Rasio/ Tahun	CAR (%)	BDR (%)	NPM (%)	ROA (%)	LDR (%)	IER (%)
2010	29,52	6,93	5,81	2,90	58,93	9,81
2011	30,62	8,67	4,80	1,86	67,38	9,44
2012	26,87	12,59	-15,62	0,38	73,86	10,04
2013	29,28	9,48	-10,36	0,93	77,45	7,26
2014	18,28	11,00	-21,11	-1,79	71,93	11,63

Sumber : bi.go.id (data diolah)

Dari tabel 1.1 dapat dibuat grafik perkembangan kinerja BPR di kota Bandung untuk periode tahun 2010-2014 seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber : bi.go.id (data diolah)

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Kinerja BPR di Kota Bandung Periode Tahun 2010 – 2014

Beberapa indikator menunjukkan masih rendahnya kinerja BPR di kota Bandung, antara lain pada aspek *capital* yang menggunakan rasio CAR secara rata-rata dari tahun 2010 hingga 2014 dapat dinyatakan baik karena sudah sesuai dengan standar Bank Indonesia yaitu minimal sebesar 8% walaupun pada beberapa bank mendapat hasil negatif.

Aspek *assets quality* menggunakan rasio BDR, secara rata-rata mengalami penurunan dan kenaikan namun tidak melampaui standar yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 15,5%. Pada aspek *management* yang menggunakan rasio NPM, secara rata-rata setiap tahunnya mengalami penurunan hingga mencapai angka -21,11% pada tahun 2014 walaupun angka tersebut berada dibawah standar yaitu sebesar 5%.

Aspek *earnings* menggunakan rasio ROA mengalami penurunan di setiap tahunnya yaitu secara rata-rata menunjukkan angka -1,79% pada tahun 2014,

angka ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya walaupun masih berada dibawah standar yaitu sebesar 1,5%. Pada rasio LDR yang mewakili aspek likuiditas, walaupun mengalami kenaikan di setiap tahunnya namun besar rasio LDR lebih rendah dari standar yang diatur oleh Bank Indonesia yang idealnya minimal sebesar 85% hingga maksimal sebesar 110%. Rasio IER pada BPR kota Bandung yang mewakili aspek *sensitivity to market risk* jauh memenuhi standar Bank Indonesia yang sebesar 5%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja BPR di kota Bandung pada tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode CAMELS dapat dikatakan tidak baik, karena besarnya rasio CAMELS setiap tahunnya banyak yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia, secara rata-rata ada beberapa rasio yang melebihi standar bahkan memiliki nilai yang negatif walaupun nilainya berada dibawah standar.

Kinerja bank yang menurun akan memberikan pengaruh terhadap makro perekonomian dan menimbulkan kesan yang kurang kondusif terhadap perbankan nasional. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha bank dimana bank akan mendapatkan kebijakan khusus dari Bank Indonesia yaitu dengan dibekukannya kegiatan usaha bank tersebut, hal ini akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi bank lain yang sedang beroperasi karena arus kegiatan usaha atau perputaran dana menjadi terhenti, sedangkan bagi bank itu sendiri akan menyandang predikat yang tidak cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu badan usaha yang dominan menguasai sektor perekonomian. Selain itu, akan berdampak pada nasabah karena nasabah akan merasa dirugikan dan merasa kecewa terhadap kredibilitas dari bank dimana mereka menitipkan sebagian dananya. Para nasabah akan kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut sehingga mereka akan menarik dana yang mereka titipkan. Hal ini akan menimbulkan citra yang buruk bagi bank dimata nasabah, walaupun dana para nasabah sudah mendapat jaminan tetap tidak akan menggantikan rasa kepercayaan nasabah yang telah hilang.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta 1998, seperti dikutip oleh Prasahnugraha (Fauziah,2013) menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja pada suatu bank adalah sebagai berikut:

‘Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, dampak likuidasi bank-bank yang memicu penarikan dana besar-besaran, semakin turunnya permodalan bank-bank, tidak mampu menutup kewajibannya terutama karena menurunnya nilai tukar rupiah, pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), modal bank atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) belum mencerminkan kemampuan riil untuk menyerap berbagai resiko, manajemen tidak profesional, dan moral hazard’.

Salah satu penyebab menurunnya kinerja pada suatu bank adalah manajemen yang tidak profesional. Kelemahan tersebut terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional, yaitu dikeluarkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. API memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni (Darmawan,2013):

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API adalah menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Melalui penerapan GCG pada aktivitas perbankan diharapkan kinerja operasional perbankan akan semakin kuat dengan kemampuan menghadapi risiko yang semakin baik.

Usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting yaitu: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (2) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (3) Pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas bank (Zarkasyi, 2008:112).

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Indonesia untuk mengatur sistem manajemen bank dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan GCG berupa Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, terdapat empat faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja keuangan perbankan, yaitu:

1. Profil risiko, merupakan penilaian terhadap risiko-risiko dalam operasional bank yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.
2. Penerapan *good corporate governance*.
3. Penilaian rentabilitas.
4. Penilaian permodalan.

Penerapan GCG dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat serta meningkatkan kinerja keuangan perbankan dengan mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan manajer.

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan bahwa manfaat dari GCG salah satunya adalah melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara GCG terhadap kinerja perbankan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adebayo *et al* (2014) mengemukakan bahwa praktik GCG meningkatkan transparansi perusahaan, menjamin akuntabilitas dan meningkatkan profitabilitas, hasil secara umum bahwa GCG memberikan pengaruh bagi kinerja perusahaan.

Hasil penelitian dari Ben *et al* (2015) mengemukakan bahwa adanya hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja perbankan. Norwani *et al* (2011) menyatakan bahwa kegagalan *corporate governance* akan menimbulkan kegagalan pula pada kinerja keuangan.

Dewi & Dwijaputri (2014) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan. Penelitian dari Muktiyanto (2011) mengemukakan bahwa mekanisme *corporate governance* berdampak terhadap

kinerja efisiensi perbankan di Indonesia. Ristifani (2009) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara implementasi prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja bank.

Pelaksanaan GCG dipilih karena peneliti ingin mengungkapkan faktor internal atau manajemen pada bank dapat mempengaruhi kinerja bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dan hasil dari penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, semakin baik penerapan GCG maka semakin baik pula kinerja pada bank tersebut.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimanakah pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014”**. Permasalahan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *good corporate governance* pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.
2. Bagaimana gambaran kinerja perbankan pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.
3. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran *good corporate governance* pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.
2. Mengetahui gambaran kinerja perbankan pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.

3. Mengetahui bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan pada BPR di kota Bandung tahun 2010 hingga 2014.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dunia pendidikan dalam hal ini pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan bahan ajar khususnya dalam bidang sistem pengendalian manajemen dan manajemen keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Institusi

Sebagai saran dan masukan yang dapat dipergunakan bagi manajemen institusi sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik. Agar di masa mendatang manajemen institusi menyadari perlunya melaksanakan GCG yang efektif dan efisien dalam aktivitas perbankan.

b. Bagi Peneliti atau Pembaca

Sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.